

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai UUD 1945 Pasal 23E, maka dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. BPK memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara, salah satunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD adalah ringkasan catatan akuntansi yang terjadi selama satu tahun periode dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi, denda, dan lain-lain yang mana berhubungan dengan keuangan negara sebagaimana telah diatur pasal 31 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

LKPD diperiksa oleh BPK untuk menilai kewajaran berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku dan mencari permasalahan temuan atas penyajian laporan keuangan yang berdampak material. Setelah LKPD diperiksa, BPK akan memberikan opini audit dalam sebuah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang merupakan pernyataan atas kewajaran dari LKPD. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, opini yang diberikan BPK terbagi dalam 4 jenis yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan

Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Dalam menyusun LHP maupun merumuskan opini audit tersebut, penting bagi auditor BPK untuk tetap memenuhi standar audit yang berlaku agar menjaga kepercayaan masyarakat dan profesionalitas profesi atas mutu jasa yang diberikan oleh auditor BPK.

Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan entitas pemerintah daerah di Jawa Barat yang menjadi objek pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. LKPD KBB dalam perkembangannya selama 10 tahun terakhir selalu mendapat opini WDP dan baru mendapat opini WTP pada tahun 2019, walaupun kembali menjadi WDP pada tahun 2020. Oleh karena itu penulis termotivasi untuk membandingkan kesesuaian LHP dan pemberian opini BPK atas LKPD Kabupaten Bandung Barat dengan standar maupun aturan terkait yang mengatur BPK dalam merumuskan opini audit LKPD. Sebagai tempat untuk mewujudkan motivasi tersebut, penulis menyusun karya tulis ini dengan judul “ANALISIS PEMBERIAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT OLEH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016-2020”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kesesuaian pemberian opini atas LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020 menurut UU No. 15 Tahun 2004?
- 2) Bagaimana kesesuaian laporan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020 dengan PSP 300 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan?

- 3) Bagaimana kesesuaian pemberian opini oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan Standar Audit (SA) 700 tentang opini tanpa modifikasi dan (SA) 705 tentang opini modifikasian terhadap LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Membandingkan kesesuaian pemberian opini atas LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020 menurut UU No. 15 Tahun 2004.
- 2) Membandingkan kesesuaian laporan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020 dengan PSP 300 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan.
- 3) Membandingkan kesesuaian pemberian opini oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan Standar Audit (SA) 700 tentang opini tanpa modifikasi dan (SA) 705 tentang opini modifikasian terhadap LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis ini berfokus untuk membandingkan pemberian opini yang disusun oleh BPK RI dengan standar maupun aturan yang berlaku. Selain itu juga penulis membatasi penulisan ini atas LHP LKPD Kabupaten Bandung Barat yang diterbitkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran 2016-2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik secara teoritis dan praktis, yang mana diuraikan sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

Menjadi bahan tindak lanjut penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang audit, khususnya tentang Laporan Hasil Pemeriksaan dan pemberian opini audit.

2) Manfaat Praktis

- a. Sebagai tempat untuk penulis mengimplementasikan pengetahuan mengenai opini audit dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- b. Bahan referensi pemerintah untuk membangun sistem pemerintahan dan menciptakan kebijakan yang lebih baik mengenai audit sektor publik.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memuat gambaran umum mengenai masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini, yang disusun berdasarkan masing-masing subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, akan dijelaskan teori dan aturan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas seperti opini audit, UU Nomor 15 Tahun 2004, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Standar Audit terkait opini, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan lain-lain. Teori dan aturan tersebut menjadi landasan untuk melakukan analisis atas praktik yang berlaku di BPK RI.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dijelaskan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk menyusun karya tulis ini dan gambaran umum terkait objek penulisan seperti BPK RI serta LHP LKPD Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan atas hasil pengumpulan dan pengolahan data secara tematik dengan beberapa pertanyaan terkait yang sudah disiapkan yaitu membandingkan kesesuaian antara praktik pada objek penulisan dengan teori atau aturan terkait yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan atas masalah yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah dalam karya tulis ini.